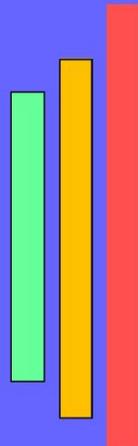


**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN BURU
TAHUN 2016**



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BURU



INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN BURU
2016



<http://burukab.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BURU 2016

ISBN :

Nomor Publikasi : 81040.1603

Katalog BPS : 4102004.8104

Ukuran Buku : 21,5 x 15,5 cm

Jumlah Halaman : 91 Halaman

Naskah : Seksi Statistik Sosial

Gambar : Seksi Integrasi, Pengolahan, dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh : ©Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru

Dicetak Oleh :

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

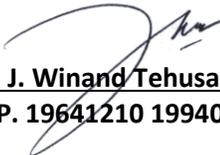
Dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen akan data statistik khususnya data Statistik Sosial, maka BPS Kabupaten Buru menerbitkan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buru Tahun 2016. Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat menyajikan informasi umum tentang bidang kependudukan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, taraf dan pola konsumsi serta perumahan dan lingkungan di Kabupaten Buru sehingga pengguna data dengan mudah dapat melihat gambaran perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan sumber data utama, sedangkan khusus untuk data ketenagakerjaan bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan baik moril maupun materiil sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan publikasi yang akan datang.

Namlea, Oktober 2016

Kepala BPS Kabupaten Buru


Ir. J. Winand Tehusalawane
NIP. 19641210 199401 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Sumber Data	3
1.5 Konsep dan Definisi	3
II. KEPENDUDUKAN	7
2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	11
2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	12
2.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan.....	17
2.4 Fertilitas	19
III. KETENAGAKERJAAN.....	28
3.1 Angkatan Kerja.....	29
3.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	37

IV. KESEHATAN.....	41
4.1 Angka Kesakitan.....	43
4.2 Cara Pengobatan.....	44
4.3 Kesehatan Ibu dan Anak.....	47
4.4 Pemberian ASI dan Gizi Balita.....	53
4.5 Pemanfaatan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan.....	59
V. PENDIDIKAN.....	62
5.1 Tingkat Pendidikan.....	63
5.2 Angka Partisipasi Sekolah.....	65
5.3 Fasilitas Pendidikan.....	71
VI. TARAF DAN POLA KONSUMSI	74
6.1 Penduduk Miskin	75
6.2 Pengeluaran Rumah Tangga	77
VII. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN.....	82
7.1 Kualitas Rumah Tinggal.....	83
7.2 Fasilitas Rumah Tinggal.....	87

DAFTAR TABEL

II. KEPENDUDUKAN

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	8
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Menurut jenis Kelamin di Kabupaten Buru tahun 2015..	10
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	12
Tabel 2.4	Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	13
Tabel 2.5	Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Buru Tahun 2013-2015	18
Tabel 2.6	Persentase Penduduk Perempuan Pernah Kawin dan Pernah Hamil Berusia 10 Tahun Keatas dan Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Buru Tahun 2015	20
Tabel 2.7	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Pernah/Sedang Menggunakan Alat KB atau Cara Tradisional Untuk Menunda atau Mencegah Kehamilan Perkawinan di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	21
Tabel 2.8	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Pernah/Tidak Pernah Menggunakan Alat KB atau Cara Tradisional dan Alasan	

Utama Tidak Menggunakan KB di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	22
Tabel 2.9 Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun dan Alat KB atau Cara Tradisional yang Digunakan di Kabupaten Buru Tahun 2015	23
Tabel 2.10 Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun yang Menggunakan Alat KB Modern dan Tempat Memperoleh Alat KB Modern di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	26

III. KETENAGAKERJAAN

Tabel 3.1 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buru Tahun 2015	30
Tabel 3.2 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	32
Tabel 3.3 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buru Tahun 2015	35
Tabel 3.4 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buru Tahun 2015	38

IV. KESEHATAN

Tabel 4.1	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buru Tahun 2013-2015.....	43
Tabel 4.2	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Cara Pengobatan yang Dilakukan Kabupaten Buru Tahun 2015.....	45
Tabel 4.3	Persentase Penduduk yang Melakukan Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Buru tahun 2015.....	46
Tabel 4.4	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Kabupaten Buru Tahun 2015	48
Tabel 4.5	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Berat Badan Anak Lahir yang Terakhir Ketika Dilahirkan di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	51
Tabel 4.6	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin yang Melakukan Inisiasi Dini Lahir dan Jarak Waktu Menyusui Pertama Kali dengan Kelahiran di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	52
Tabel 4.7	Persentase Balita Usia 2-4 Tahun Menurut Lamanya Disusui di Kabupaten Buru Tahun 2015	54
Tabel 4.8	Persentase Balita Menurut Status Gizi di Kabupaten Buru Tahun 2015	56

Tabel 4.9	Persentase Anak Kurang dari 2 Tahun yang Mendapat Makanan atau Cairan yang Dimakan Dalam 24 Jam di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	57
Tabel 4.10	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	60
Tabel 4.11	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	61

V. PENDIDIKAN

Tabel 5.1	Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Keatas Berdasarkan Kemampuan Membaca dan Menulis Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buru Tahun 2015..	64
Tabel 5.2	Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Kelompok Umur 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	65
Tabel 5.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	67
Tabel 5.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buru Tahun 2015	69
Tabel 5.5	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	70

Tabel 5.6 Jumlah Fasilitas Pendidikan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	72
--	----

VI. TARAF HIDUP DAN POLA KONSUMSI

Tabel 6.1 Persentase Penduduk Miskin (Po), Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Buru Tahun 2013-2015	76
Tabel 6.2 Persentase Konsumsi Protein dan Konsumsi Kalori per Kapita per Hari di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	78
Tabel 6.3 Rata-rata Pengeluaran Sebulan per Kapita Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Buru Tahun 2015	79

VII. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jenis Atap Terluas di Kabupaten Buru Tahun 2015	84
Tabel 7.2 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jenis Dinding Terluas di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	85
Tabel 7.3 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jenis Lantai Terluas di Kabupaten Buru Tahun 2015	86
Tabel 7.4 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum Utama di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	88
Tabel 7.5 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Penerangan di Kabupaten Buru Tahun 2015	90

DAFTAR GAMBAR

II. KEPENDUDUKAN

Gambar 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	9
Gambar 2.2 Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Tahun 2015	16
Gambar 2.3 Persentase Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun dan Alat KB atau Cara Tradisional yang Digunakan di Kabupaten Buru Tahun 2015	25

III. KETENAGAKERJAAN

Gambar 3.1 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	33
Gambar 3.2 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Buru Tahun 2015	36
Gambar 3.3 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buru Tahun 2015	39

IV. KESEHATAN

Gambar 4.1 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	47
--	----

Gambar 4.2 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	49
Gambar 4.3 Persentase Balita Berumur 2-4 Tahun Menurut Lamanya Disusui di Kabupaten Buru Tahun 2015	55
Gambar 4.4 Persentase Balita Berumur 2-4 Tahun Menurut Status Gizi di Kabupaten Buru Tahun 2015	56
Gambar 4.5 Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Mendapat Makanan atau Cairan yang Dimakan Dalam 24 Jam di Kabupaten Buru Tahun 2015	58

V. PENDIDIKAN

Gambar 5.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Buru Tahun 2015	68
--	----

VI. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Gambar 6.1 Rata-rata Pengeluaran Sebulan per Kapita Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Buru Tahun 2015.....	81
--	----

VII. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum Utama di Kabupaten Buru Tahun 2015	91
---	----

<http://burukab.bps.go.id>

I PENDAHULUAN

<http://bukukab.bps.go.id>

I

PENJELASAN UMUM

1.1 Latar Belakang

Dalam sejarah manusia, dari satu peradaban ke peradaban lainnya, kesejahteraan merupakan tujuan dalam perjalanan hidup manusia. Jika ditelaah bagaimana bangsa Arab, Mesir, Yunani, dan Cina membangun peradaban dimana penguasa menyusun suatu sistem kehidupan masyarakat di berbagai bidang, tentu semuanya tak lepas dari tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakatnya pada masa itu.

Dalam era modern sekarang ini, dunia telah terkotak-kotak dengan batas administrasi baik berupa batas negara, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai dengan tingkat desa. Seluruh wilayah administrasi itu tentunya memiliki pemimpin yang memiliki cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, tak terkecuali dengan pemerintah daerah Kabupaten Buru.

Dalam usaha mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan sebuah basis data yang memuat kondisi, perkembangan dari tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buru. Basis data ini dapat diperoleh dari Indikator Kesejahteraan Rakyat yang berfungsi sebagai alat akselerasi dari program pembangunan di Kabupaten

Buru, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat menyentuh semua komponen yang mempengaruhi seluruh aspek pembangunan untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakatnya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari publikasi ini adalah menyajikan data dan informasi mengenai kondisi kesejahteraan rakyat di Kabupaten Buru. Selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia di Kabupaten Buru, termasuk penentuan sektor-sektor prioritas dalam pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi penulisan ini menyajikan analisis mengenai kondisi kesejahteraan rakyat di Kabupaten Buru dari segi perkembangannya, perbandingan antar waktu yang meliputi aspek spesifik yaitu: kependudukan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, taraf dan pola konsumsi masyarakat, perumahan dan lingkungan.

Setiap aspek disajikan secara terpisah dalam bab tersendiri. Data akan disajikan dalam bentuk tabel serta visual, yaitu dalam bentuk grafik (*histogram, line chart, pie chart*) sehingga dalam

analisis dapat lebih mudah dipahami.

1.4 Sumber Data

Penerbitan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buru Tahun 2016 merupakan rangkaian data dasar (data primer), yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru seperti Survei Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan pendataan lainnya yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan data sekunder yang berasal dari instansi pemerintah yang ada kaitannya dengan publikasi ini.

Mulai tahun 2011, Susenas dan Sakernas dilaksanakan setiap triwulan, dimana Sakernas dilaksanakan pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November, sedangkan Susenas dilaksanakan pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

1.5 Konsep dan Definisi

❖ **Kependudukan**

✚ **Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih ataupun kurang dari enam bulan namun bertujuan untuk menetap.

✚ **Rasio jenis kelamin** adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam

banyaknya penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

- + **Kepadatan penduduk** adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi.
- + **Rasio ketergantungan adalah** perbandingan antara banyaknya penduduk usia tidak produktif (kelompok umur dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas) dengan banyaknya penduduk usia produktif (kelompok umur 15-64 tahun). Indikator ini lebih dikenal dengan rasio beban ketergantungan.

❖ **Ketenagakerjaan**

- + **Penduduk usia kerja** adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas.
- + **Angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja yang bekerja, sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
- + **Bekerja** adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).
- + **Lapangan usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja seseorang. Klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam 1 digit.

❖ **Kesehatan**

✚ **Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, atau lainnya. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

✚ **Rawat jalan atau berobat jalan** adalah kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau mengatasi gangguan/keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas medis ke rumah pasien, membeli obat, atau petugas kesehatan yang melakukan pengobatan sendiri.

❖ **Pendidikan**

✚ **Masih bersekolah** adalah sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah, atau tinggi.

❖ **Taraf dan Pola Konsumsi**

✚ **Konsumsi/pengeluaran rumah tangga** adalah pengeluaran untuk kebutuhan semua anggota rumah tangga yang terbagi atas pengeluaran makanan dan bukan makanan. Kebutuhan makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, dan tambahan *snack*.

❖ **Perumahan dan Lingkungan**

- ✚ **Bangunan fisik** adalah tempat perlindungan yang mempunyai dinding, lantai, dan atap, baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
- ✚ **Rumah tangga** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau bangunan sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
- ✚ **Luas lantai** adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai, seperti lumbung padi, kandang ternak, dan tempat menjemur.
- ✚ **Atap** adalah penutup bagian atas bangunan sehingga dapat melindungi orang yang mendiami dibawahnya dari terik matahari, hujan, dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.
- ✚ **Dinding** adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.
- ✚ **Sumur terlindung** adalah sumur yang dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut sumur terdapat lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur tersebut.

II KEPENDUDUKAN

<http://burukab.go.id>



II KEPENDUDUKAN

Selain sebagai sumber daya pembangunan, penduduk juga merupakan sasaran dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, tak salah kiranya jika disebutkan bahwa penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan.

Sama halnya dengan sebagian besar negara berkembang lainnya, Indonesia juga menghadapi masalah kependudukan, antara lain jumlah penduduk yang besar dan disertai dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, serta persebaran penduduk yang tidak merata. Dari hasil Sensus Penduduk tahun 2010, penduduk Indonesia telah mencapai 237.641.326 jiwa atau naik 15,85 persen dibandingkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000.

Jumlah penduduk yang tinggi ini apabila dapat dikelola dengan baik dapat menjadi modal bagi pembangunan. Dan sebaliknya, apabila tidak dapat dikelola dengan baik, akan menjadi beban yang pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan itu sendiri.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan handal harus dimulai dari perencanaan pembangunan kependudukan yang berkualitas pula. Perencanaan yang baik harus didukung dengan fakta dan data kependudukan yang akurat. Dari data kependudukan pemerintah dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pembangunan dapat menyusun berbagai perencanaan menyangkut kebutuhan fasilitas

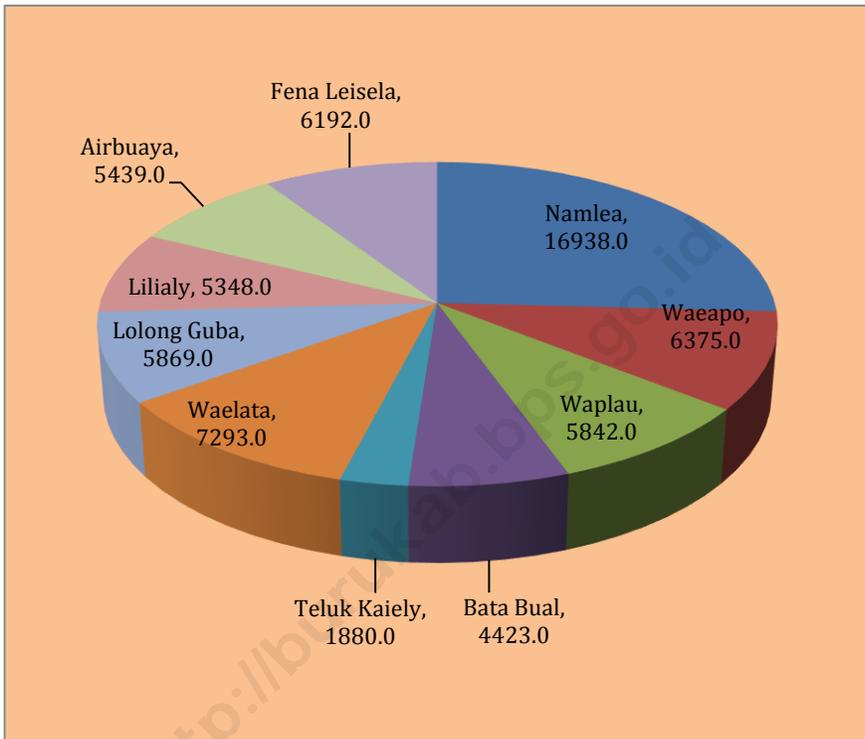
pokok dan fasilitas penunjang kesejahteraan rakyat (seperti pangan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, perumahan, pasar, tempat ibadah, tempat rekreasi, dan kebutuhan masyarakat lainnya).

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di
Kabupaten Buru Tahun 2015

Kecamatan	Jenis Kelamin (Ribuan)		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Namlea	16.938	16.381	33.319	1,03
Waeapo	6.375	5.985	12.360	1,07
Waplau	5.842	5.642	11.484	1,04
Bata Bual	4.423	4.256	8.679	1,04
Teluk Kaiely	1.880	1.760	3.640	1,07
Waelata	7.293	6.624	13.917	1,1
Lolong Guba	5.869	5.464	11.334	1,07
Lilialy	5.348	5.228	10.576	1,02
Airbuaya	5.439	5.190	10.629	1,05
Fena Leisela	6.192	5.780	11.972	1,07
Buru	65.599	62.311	127.910	1,05

Sumber : Kabupaten Buru Dalam Angka 2016

Gambar 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Buru Tahun 2015



Sumber : Kabupaten Buru Dalam Angka 2016

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Menurut Jenis
Kelamin di Kabupaten Buru Tahun 2015

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
[1]	[2]	[3]	[4]
0-4	8.015	7.735	15.750
5-9	7.974	7.360	15.334
10-14	7.397	6.815	14.212
15-19	6.218	6.045	12.263
20-24	5.313	5.279	10.592
25-29	5.754	5.879	11.633
30-34	5.424	5.349	10.773
35-39	4.595	4.610	9.205
40-44	4.023	3.473	7.496
45-49	2.836	2.598	5.434
50-54	2.333	2.146	4.479
55-59	1.839	1.665	3.504
60-64	1.510	1.274	2.784
65+	2.368	2.083	4.451
Jumlah	65.599	62.311	127.910

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah penduduk di Kabupaten Buru menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Jumlah penduduk pada tahun 2015 mencapai 127.910 jiwa atau naik dibandingkan jumlah penduduk pada tahun-tahun sebelumnya.

Pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Buru dalam beberapa tahun terakhir cukup tinggi, yaitu di atas 2 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi apabila tidak ditunjang dengan pertumbuhan ekonomi yang seimbang akan menyebabkan ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dan jumlah penduduk yang akan masuk ke pasar tenaga kerja. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Buru disamping akan memperbesar kemungkinan munculnya berbagai penyakit sosial yang telah disebutkan sebelumnya.

Bila dilihat dari jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Buru, baik secara keseluruhan maupun untuk masing-masing kecamatan lebih besar dari jumlah penduduk perempuan sehingga rasio jenis kelamin berada di atas 100. Untuk tahun 2015, rasio jenis kelamin Kabupaten Buru sebesar 1,05.

Tabel 2.3

**Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Tahun 2015**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribuan)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Namlea	28.261	32.303	33.319	17,9	3,15
Waeapo	10.456	11.982	12.360	18,21	3,15
Waplau	9.738	11.138	11.484	17,93	3,11
Bata Bual	7.365	8.414	8.679	17,84	3,15
Teluk Kaiely	3.089	3.532	3.640	17,84	3,06
Waelata	11.781	13.497	13.917	18,13	3,11
Lolong Guba	9.609	10.992	11.334	17,95	3,11
Lilialy	8.957	10.253	10.576	18,08	3,15
Airbuaya	9.020	10.303	10.629	17,84	3,16
Fena Leisela	10.169	11.608	11.972	17,73	3,14
Buru	108.445	124.022	127.910	17,95	3,13

Sumber : Kabupaten Buru Dalam Angka 2016

2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu masalah kependudukan yang dihadapi oleh Indonesia adalah persebaran

penduduk yang tidak merata. Menurut hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, Pulau Jawa yang luas wilayahnya hanya mencakup 6,8 persen dari keseluruhan wilayah Indonesia didiami oleh 57,5 persen dari penduduk Indonesia. Berbeda dengan itu, dengan luas wilayah mencapai 21,8 persen dari luas wilayah, Pulau Papua hanya ditempati oleh 1,5 persen penduduk Indonesia.

Tabel 2.4
Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Buru Tahun 2015

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk
	(%)	(Jiwa/Km ²)
[1]	[2]	[3]
Namlea	26,05	35,03
Waeapo	9,66	120,59
Waplau	8,98	19,62
Bata Bual	6,79	79,92
Teluk Kaiely	2,85	25,8
Waelata	10,88	59,35
Lolong Guba	8,86	24,8
Lilialy	8,27	21,96
Airbuaya	8,31	6,24
Fena Leisela	9,36	4,23
Buru	100	16,84

Sumber: Kabupaten Buru Dalam Angka 2016

Sama halnya dengan gambaran Indonesia secara keseluruhan, Kabupaten Buru juga menghadapi masalah persebaran penduduk yang tidak merata sebagaimana terlihat pada gambar di atas. Lebih dari 25 persen penduduk terkonsentrasi di Kecamatan Namlea. Padahal, luas Kecamatan Namlea hanya 12,52 persen dari luas wilayah Kabupaten Buru secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan Kecamatan Namlea memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu sebesar 35,03 jiwa/km². Hal ini tidak mengherankan mengingat Kecamatan Namlea merupakan Ibukota Kabupaten Buru sehingga menjadikannya sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan.

Kecamatan lainnya dengan kepadatan penduduk yang tinggi adalah Kecamatan Waeapo (120,59 jiwa/km²), Kecamatan Bata Bual (79,92 jiwa/km²), dan Kecamatan Waelata (59,35 jiwa/km²). Empat kecamatan lainnya memiliki kepadatan penduduk sekitar 20 jiwa/km². Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Teluk Kaiely (25,80 jiwa/km²), Kecamatan Lolong Guba (24,82 jiwa/km²), Kecamatan Liliaty (21,96 jiwa/km²), dan Kecamatan Waplau (19,62 jiwa/km²).

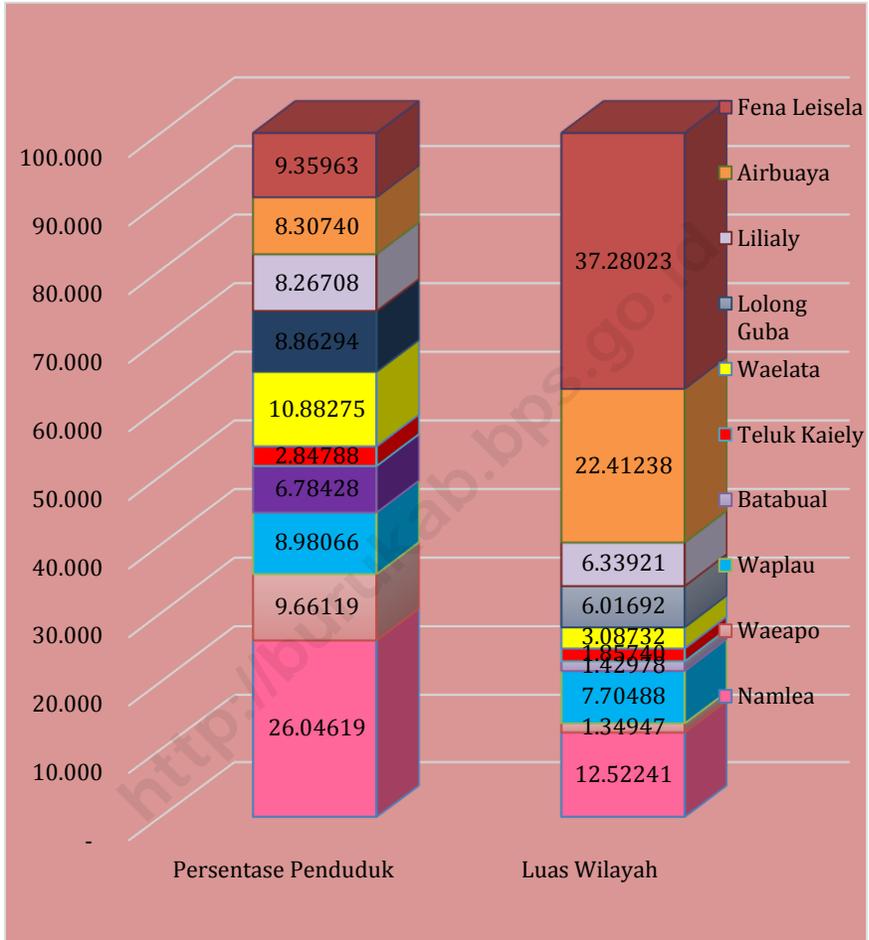
Walaupun luas wilayah kecamatan-kecamatan di atas cukup besar, namun kondisi ini diimbangi dengan jumlah penduduk yang juga tidak sedikit karena selain didiami oleh penduduk asli, beberapa kecamatan ini juga merupakan daerah tujuan transmigrasi.

Dengan luas mencapai hampir 60 persen dari total wilayah Kabupaten Buru, Kecamatan Airbuaya dan Fena Leisela merupakan

kecamatan terluas dibandingkan kelompok kecamatan lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah penduduk yang menempati kecamatan ini hanya sebesar 17,58 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Buru. Tidak mengherankan apabila Kecamatan Airbuaya dan Fena Leisela merupakan dua kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah, yaitu masing-masing memiliki kepadatan penduduk (6,24 jiwa/km²) dan (4,23 jiwa/km²). Dengan adanya pemekaran dusun menjadi desa di Kecamatan Airbuaya serta terbentuknya Kecamatan Fena Leisela diharapkan pemerataan penduduk semakin terwujud.

Untuk mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata, diperlukan usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buru untuk memberikan dorongan dalam distribusi pembangunan di bidang ekonomi dan sosial di wilayah-wilayah yang memiliki kepadatan penduduk rendah sehingga dapat menarik minat penduduk untuk menetap di wilayah tersebut. Namun perlu disadari bahwa semakin padatnya penduduk di suatu wilayah akan meningkatkan permintaan akan kebutuhan penduduk itu sendiri. Apabila hal ini tidak seimbang, bukan tidak mungkin akan menimbulkan masalah baru yaitu ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Gambar 2.2
Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Buru Tahun 2015



Sumber: Kabupaten Buru Dalam Angka 2016

2.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan

Selain jumlah dan persebaran penduduk, komposisi penduduk menurut kelompok umur juga berpengaruh terhadap pembangunan dan hasil-hasilnya. Kelompok umur penduduk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan penduduk usia tidak produktif (0-4 tahun dan 65 tahun ke atas). Melalui pembagian kelompok umur ini, dapat diperoleh angka beban ketergantungan yang memberikan gambaran jumlah penduduk yang secara ekonomi tidak aktif per seratus penduduk yang aktif secara ekonomi. Semakin tinggi angka beban ketergantungan maka semakin berat tantangan yang dihadapi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, semakin rendah proporsi penduduk usia tidak produktif dan diimbangi dengan meningkatnya penduduk usia produktif akan berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat suatu wilayah.

Tabel 2.5**Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di
Kabupaten Buru Tahun 2013-2015**

Tahun	Kelompok Umur (%)			Angka Beban Ketergantungan (%)		
	0-14	15-64	65+	Anak	Tua	Total
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2013	37,70	59,01	3,29	63,89	5,58	69,48
2014	36,50	60,20	3,30	60,57	5,51	66,08
2015	36,49	60,29	3,22	60,39	5,48	65,87

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Apabila diperhatikan lebih seksama, angka beban ketergantungan di Kabupaten Buru selama tiga tahun terakhir menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda. Pada tahun 2015, angka beban ketergantungan Kabupaten Buru sebesar 65,87 persen. Yang berarti setiap 100 orang penduduk produktif harus menanggung sekitar 65 orang penduduk yang tidak produktif.

Semakin tinggi angka beban ketergantungan suatu daerah maka lambat laun dapat menghambat kualitas serta aktualisasi penduduk produktif secara ekonomi dan sosial karena harus menanggung beban penduduk yang tidak produktif. Salah satu alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah memberdayakan

program-program padat karya sehingga dapat meningkatkan peluang penduduk untuk meningkatkan produktifitasnya.

Dari total angka beban ketergantungan Kabupaten Buru sebesar 65,87 persen, hanya 5,48 persen yang merupakan angka beban ketergantungan dari penduduk usia tua sedangkan sisanya sebesar 60,39 persen merupakan angka beban ketergantungan anak. Besarnya sumbangan angka beban ketergantungan yang berasal dari penduduk usia muda (0-4 tahun) dapat diindikasikan sebagai gejala peningkatan angka fertilitas (kelahiran). Untuk itu, perlu dilaksanakan peningkatan program Keluarga Berencana untuk menekan angka fertilitas.

2.4 Fertilitas

Fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan) merupakan tiga komponen utama yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk suatu wilayah. Dari ketiga komponen tersebut, data fertilitas memiliki kelengkapan yang lebih baik mengingat kelahiran selalu diikuti oleh berbagai kebutuhan administrasi.

Tabel 2.6

Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Kawin dan Pernah Hamil Berusia 10 Tahun Keatas dan Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Buru Tahun 2015

Umur	Penduduk Perempuan yang Pernah Kawin Berusia 10 Tahun Keatas dan Umur Perkawinan Pertama	Penduduk Perempuan yang Pernah Hamil Berusia 10 Tahun Keatas dan Umur Pertama Kali Hamil
[1]	[2]	[3]
≤16	10,89	14,73
17-18	17,09	21,33
19-20	20,07	26,37
21+	51,95	37,57

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Fertilitas terkait erat dengan usia perempuan saat melakukan perkawinan pertama. Pada tahun 2015, persentase perempuan berusia 10 tahun ke atas yang pada saat perkawinan pertama berumur kurang dari 16 tahun sebesar 10,89 persen dengan persentase pernah hamil 14,73 persen, usia 17-18 tahun sebesar 17,09 persen dengan persentase pernah hamil 21,33 persen, usia 19-20 tahun sebesar 20,07 persen dengan persentase hamil 26,37 persen dan usia diatas 21 tahun sebesar 51,95 persen dengan persentase pernah hamil 37,57 persen.

Tabel 2.7

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Pernah/Sedang Menggunakan Alat KB atau Cara Tradisional Untuk Menunda atau Mencegah Kehamilan di Kabupaten Buru Tahun 2015

Uraian	Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Pernah/Sedang Menggunakan Alat KB atau Cara Tradisional Untuk Menunda atau Mencegah Kehamilan
[1]	[2]
Pernah	9,99
Sedang	54,74
Tidak Pernah Menggunakan	35,27

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Selain penundaan usia perkawinan pertama, penggunaan alat kontrasepsi pada perempuan usia subur juga mempengaruhi pola fertilitas karena dapat menunda atau mencegah kehamilan. Penggunaan alat kontrasepsi baik secara modern maupun tradisional oleh penduduk perempuan kawin usia 15-49 tahun di Kabupaten Buru cukup tinggi. Yang pernah menggunakan sebesar 9,99 persen, sedang 54,74 persen dan tidak pernah menggunakan sebesar 35,27 persen.

Tabel 2.8

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Pernah/Tidak Pernah Menggunakan Alat KB atau Cara Tradisional dan Alasan Utama Tidak Menggunakan KB di Kabupaten Buru Tahun 2015

Alasan Utama Tidak Menggunakan Alat KB	Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Pernah/Tidak Pernah Menggunakan Alat KB atau Cara Tradisional dan Alasan Utama Tidak Menggunakan KB
[1]	[2]
Fertilitas	10,02
Tidak Setuju KB	10,27
Tidak Tahu Alat/Cara KB	0,00
Takut Efek Samping	10,2
Lainnya	64,09
Tidak Tahu	5,41

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tabel 2.9
Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun dan Alat
KB atau Cara Tradisional yang Digunakan di
Kabupaten Buru Tahun 2015

Alat KB atau Cara Tradisional yang Sedang Digunakan	Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun dan Alat KB atau Cara Tradisional yang Digunakan
[1]	[2]
MOW	0,00
MOP/Vasektomi	0,20
AKDR/IUD/Spiral	1,02
Suntikan	69,13
Susuk KB	18,22
Pil	11,44
Intravag/Kondom Perempuan	0,00
Metode Menyusui Alami	0,00
Pantang Berkala	0,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

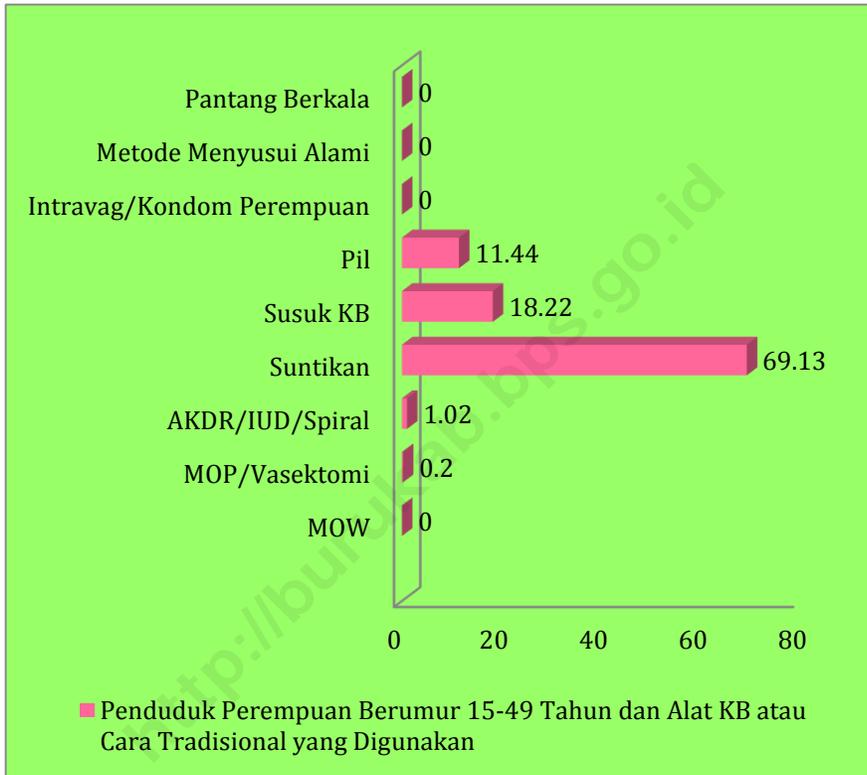
Lima jenis alat kontrasepsi yang banyak dipakai oleh akseptor KB yang aktif di Kabupaten Buru adalah jenis MOP/Vasektomi, Spiral, Suntikan, Susuk KB, dan Pil. Hal ini tidak mengherankan mengingat kelima jenis tersebut merupakan jenis alat KB yang paling dikenal oleh masyarakat. Dari gambar tersebut juga tersirat bahwa urusan KB dalam hal penggunaan alat kontrasepsi modern lebih banyak digunakan daripada alat kontrasepsi tradisional.

Penggunaan alat kontrasepsi Suntikan yang paling banyak digunakan sebesar 69,13 persen, Susuk KB sebesar 18,22 persen, Pil KB sebesar 11,44 persen, Spiral sebesar 1,02 dan MOP/Vasektomi hanya 0,20 persen.

Penggunaan alat KB modern merupakan cara yang paling diminati oleh perempuan usia subur dibandingkan dengan cara tradisional yang dapat dilihat dari gambar yang telah dijelaskan diatas.

Gambar 2.3

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun dan Alat KB atau Cara Tradisional yang Digunakan di Kabupaten Buru Tahun 2015



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tabel 2.10

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Menggunakan Alat KB Modern dan Tempat Memperoleh Alat KB Modern di Kabupaten Buru Tahun 2015

Terakhir Kali Membeli Alat KB Modern	Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Menggunakan Alat KB Modern dan Tempat Memperoleh Alat KB Modern
[1]	[2]
Rumah Sakit	1,03
Puskesmas/Pustu	30,86
TKBK/TMK/MUYA	0,00
Polindes/Poskesdes	2,69
Posyandu/PKBD	5,44
Rumah Bersalin	0,00
Praktek Dokter Umum/Kandungan	0,90
Praktek Bidan/Bidan di Desa/Perawat	57,43
Apotek/TokoObat	1,66

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Untuk dapat memperoleh alat KB modern tersebut, perempuan usia 15-49 tahun dapat membeli di berbagai tempat. Yang paling banyak yakni di Praktek Bidan/Bidan Desa/Perawat sebesar 57,43 persen, Puskesmas/Pustu sebesar 30,86 persen, Posyandu sebesar 5,44 persen, Polindes/Poskesdes sebesar 2,69 persen, Apotek/Toko Obat sebesar 1,66 persen dan Praktek Dokter Umum/Kandungan sebesar 0,90 persen.

<http://burukab.bps.go.id>

III

KETENAGAKERJAAN

Sama halnya dengan negara-negara lain di dunia, Indonesia juga memiliki masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja. Belum lagi Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Ini menjadikan masalah ketenagakerjaan di Indonesia menjadi sangat penting untuk segera dicari solusi penyelesaiannya, tidak hanya permasalahan yang berhubungan dengan kuantitas, namun juga kualitas tenaga kerja itu sendiri. Jika tersedia tenaga kerja yang cukup besar namun kualitasnya rendah, akan mempengaruhi jalannya proses pembangunan itu sendiri. Namun jika jumlah tenaga kerja yang banyak itu tidak terserap atau dengan kata lain terjadi pengangguran yang cukup tinggi, maka dengan sendirinya akan menjadi beban bagi daerah itu sendiri.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah masih sulitnya arus masuk modal asing, perilaku proteksionis sejumlah negara-negara maju dalam menerima ekspor dari negara-negara berkembang, iklim investasi, pasar global, berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha, serta tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. Masalah lain yang tak kalah pentingnya adalah pelaksanaan otonomi daerah yang dalam banyak hal seringkali tidak

mendukung penciptaan lapangan kerja atau tidak ramah terhadap tenaga kerja.

Masalah ketenagakerjaan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah-masalah lainnya, termasuk kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan stabilitas politik. Para pengambil kebijakan di negeri ini pastinya telah menyadari akan hal tersebut, namun perlu ditekankan bahwa masalah ketenagakerjaan di Indonesia merupakan masalah multidimensi. Untuk mengatasinya, tidak ada jalan pintas atau sederhana, melainkan dibutuhkan rencana jangka panjang yang terdiri dari serangkaian program yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah, dan terpadu.

3.1 Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja terbagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang aktif dalam perekonomian, yaitu mereka yang sedang bekerja, sementara tidak bekerja, dan menganggur. Sedangkan yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak aktif dalam perekonomian, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga, ataupun sebab lainnya.

Tabel 3.1
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas
Menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Buru Tahun 2015

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Total
[1]	[2]	[3]	[4]
Angkatan Kerja			55.760
• Bekerja	35.478	17.474	52.952
• Pengangguran	1.064	1.744	2.808
Bukan Angkatan Kerja			27.311
• Sekolah	3.567	4.832	8.399
• Mengurus Rumah Tangga	416	15.103	15.519
• Lainnya	1.926	1.467	3.393
Penduduk Usia Kerja	42.451	40.020	83.071

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional

Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2015, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Buru berjumlah 83.071 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 55.760 orang aktif secara ekonomi dan sisanya sebanyak 27.311 orang tidak aktif

secara ekonomi baik karena faktor sekolah, mengurus rumah tangga maupun alasan lainnya.

tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 35.478 orang, sedangkan perempuan hanya 17.474 orang. Hal ini kemungkinan terjadi karena laki-laki memiliki peluang untuk bekerja lebih besar daripada perempuan. Selain itu, jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh laki-laki pun relatif lebih beragam dibandingkan perempuan.

Untuk itu, pemerintah daerah tampaknya harus memberikan stimulasi berupa perluasan pilihan lapangan pekerjaan sehingga kesempatan kerja bagi perempuan dapat meningkat. Dengan demikian, ketimpangan gender dalam hal partisipasi dalam dunia ketenagakerjaan dapat dikurangi.

Sedangkan jumlah penduduk laki-laki yang menganggur sebesar 1.064 orang dan perempuan sebesar 1.744 orang.

Perempuan yang mengurus rumah tangga di Kabupaten Buru sebesar 15.103 orang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki yang hanya 416 orang.

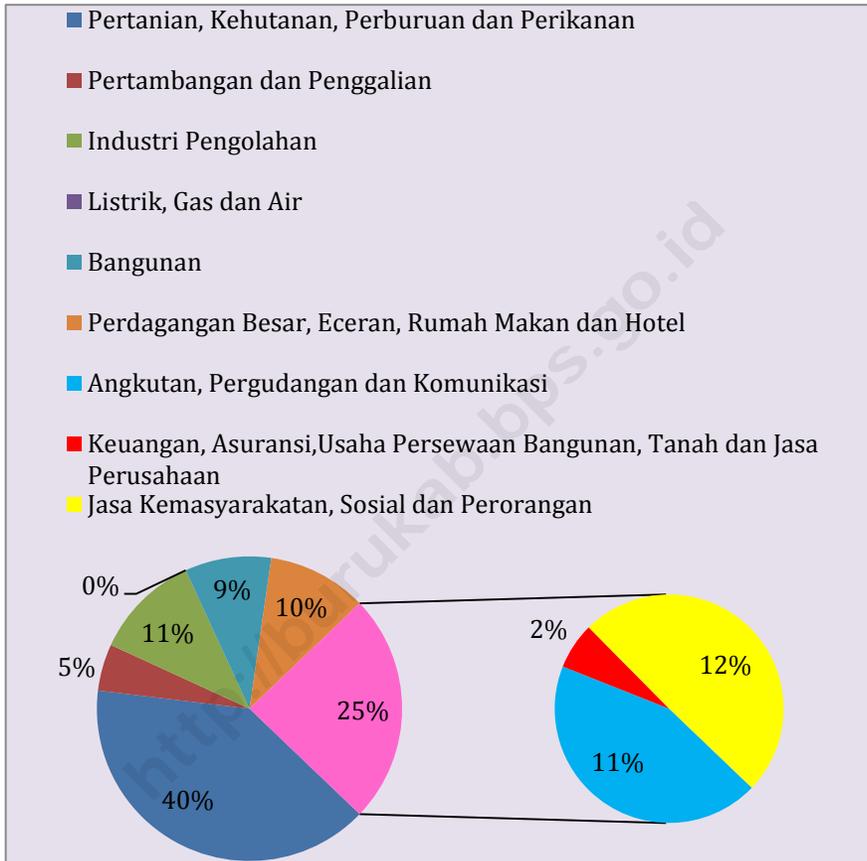
Tabel 3.2

**Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu
yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Buru Tahun 2015**

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	14.102	6.421	20.523
Pertambangan dan Penggalian	1.758	167	1.925
Industri Pengolahan	4.001	1.533	5.534
Listrik, Gas dan Air	0	0	0
Bangunan	3.245	40	3.285
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	3.743	5.439	9.182
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	3.785	0	3.785
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	568	55	623
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	4.276	3.819	7.435
Jumlah	35.478	17.474	52.952

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional

Gambar 3.1
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di
Kabupaten Buru Tahun 2015



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas 2015)

Apabila dilihat menurut lapangan usaha sektor primer, dalam hal ini sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalan masih mendominasi dalam hal penyerapan tenaga kerja, secara total sebesar 45 persen, sektor sekunder yang diwakili oleh sektor industri pengolahan, sektor konstruksi masing-masing menyerap tenaga kerja sebesar 11 persen dan 9 persen. Sektor tersier yang terdiri atas sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan secara total menyerap tenaga kerja sebesar 25 persen.

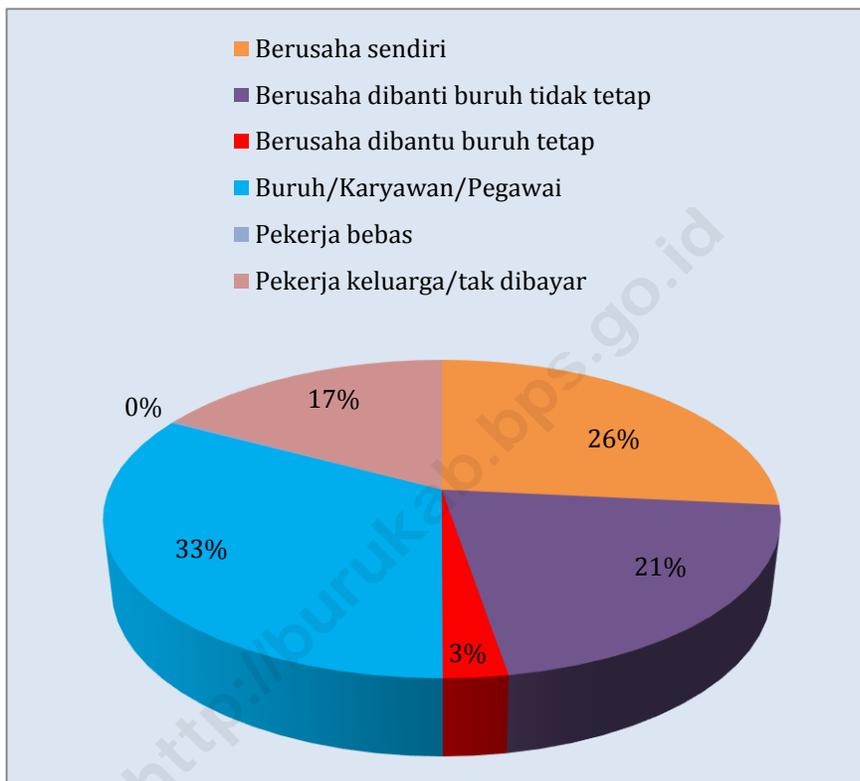
Tabel 3.3

Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buru Tahun 2015

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]
Berusaha sendiri	10.457	3.589	14.046
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	8.363	2.653	11.016
Berusaha dibantu buruh tetap	1.185	184	1.369
Buruh/Karyawan/Pegawai	12.358	5.063	17.371
Pekerja bebas	0	120	120
Pekerja keluarga/tak dibayar	3.115	5.865	8.980
Jumlah	35.478	17.474	52.902

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional

Gambar 3.2
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan di
Kabupaten Buru Tahun 2015



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional

Berdasarkan gambar di atas, pada umumnya sebagian besar penduduk yang bekerja di Kabupaten Buru berstatus berusaha sendiri; berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar ; buruh/karyawan/pegawai; ataupun sebagai pekerja keluarga. Sedangkan yang berstatus sebagai pekerja bebas dan berusaha

dibantu buruh tetap/buruh dibayar secara kumulatif jumlahnya tidak lebih dari 10 persen.

3.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase perbandingan jumlah angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja. Indikator ini dapat menggambarkan jumlah pasokan tenaga kerja dalam suatu wilayah yang dapat memproduksi barang maupun jasa.

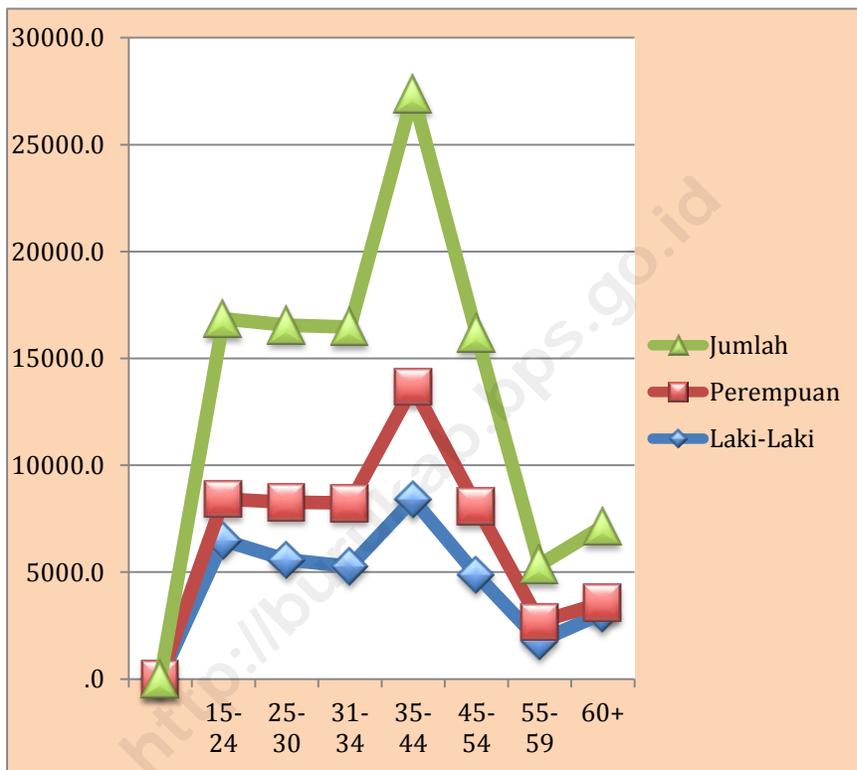
Apabila dilihat menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki baik secara keseluruhan maupun untuk masing-masing kelompok umur selalu lebih besar daripada TPAK perempuan. Secara umum, TPAK laki-laki Kabupaten Buru tahun 2015 sebesar 35.478 orang. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan TPAK perempuan yang hanya sebesar 17.474 orang. Hal ini kemungkinan disebabkan karena dalam rumah tangga, biasanya laki-laki bertindak sebagai kepala keluarga atau bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga tersebut.

Tabel 3.4
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama
Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Buru Tahun 2015

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]
15-24	6.486	1.941	8.427
25-30	5.573	2.702	8.275
31-34	5.272	2.964	8.236
35-44	8.410	5.273	13.683
45-54	4.881	3.205	8.086
55-59	1.777	896	2.673
60+	3.079	493	3.572
Jumlah	35.478	17.474	52.952

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional

Gambar 3.3
Persentase Penduduk Bekerja
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Buru Tahun 2015



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional

Dari gambar tersebut terlihat bahwa umur sangat mempengaruhi penduduk untuk masuk ke dalam pasar kerja. Pada kelompok umur muda, sebagian besar penduduk cenderung memilih sekolah daripada bekerja atau mencari pekerjaan. Begitu pula pada kelompok umur tua, banyak penduduk yang akan meninggalkan pasar kerja karena telah memasuki usia pensiun atau telah berhenti kerja.

TPAK laki-laki menunjukkan pola meningkat sampai kelompok umur tertentu kemudian stabil dan kembali menurun mulai dari kelompok usia 55-59 tahun.

TPAK perempuan menunjukkan pola siklus ketenagakerjaan yang menyerupai kurva M. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak perempuan meninggalkan pasar tenaga kerja ketika mereka menikah dan mengurus anak serta akan cenderung kembali ke pasar tenaga kerja atau kembali berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi ketika anak-anak sudah besar.

IV KESEHATAN



<http://bur.kab.go.id>

IV KESEHATAN

Faktor kesehatan menjadi satu dari tiga indikator penting penunjang pembangunan manusia karena tingkat produktivitas manusia secara langsung dapat tergalai secara optimal apabila daya tahan tubuhnya sedang maksimal. Hal ini berarti pada saat seseorang sehat, aktivitas seperti bekerja, bersekolah, mengurus rumah tangga, berolahraga, maupun aktivitas lainnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik dibandingkan saat kondisi tubuhnya sedang sakit.

Mengingat pentingnya kesehatan bagi pembangunan, tidak salah apabila disebutkan bahwa pemerintah mencanangkan visi pembangunan kesehatan yaitu tercapainya penduduk dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Departemen Kesehatan, 2003). Visi pembangunan ini merupakan cita-cita reformasi bidang kesehatan yang diangkat sebagai bagian dari pembangunan manusia secara keseluruhan selain pembangunan bidang ekonomi dan pendidikan.

Sasaran utama pembangunan kesehatan nasional adalah mewujudkan masyarakat mandiri untuk hidup sehat tanpa memperhatikan status sosial masyarakat, kaya dan miskin, pintar dan bodoh, di desa maupun di kota, di daerah tertinggal maupun di daerah

maju. Rakyat yang sehat merupakan landasan utama pembangunan bangsa dan negara. Dengan kata lain negara tanpa memiliki derajat kesehatan rakyat yang tinggi, tidak mungkin dapat melakukan aktivitas pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan kesehatan nasional memiliki beberapa hambatan, antara lain pemerataan, keterjangkauan, atau akses pelayanan kesehatan yang bermutu/berkualitas masih rendah. Masalah ini dapat disebabkan faktor geografi, ekonomi, ataupun ketidaktahuan masyarakat itu sendiri. Masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan masalah akses dan mutu pelayanan kesehatan serta kurangnya tenaga kesehatan dan penyebarannya yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintah, khususnya pemerintah daerah memiliki banyak tugas berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat di wilayahnya. Perbaikan pemeliharaan kesejahteraan rakyat ini penting untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan dan pemupukan kemampuan tenaga kerja bagi keperluan pembangunan, serta untuk meningkatkan terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan program kesehatan yang telah dilaksanakan, berikut akan dipaparkan beberapa indikator kesehatan, seperti angka kesehatan, cara pengobatan, kesehatan ibu dan anak, status gizi balita, serta fasilitas dan tenaga kesehatan di Kabupaten Buru.

4.1 Angka Kesakitan

Keadaan kesehatan penduduk pada suatu waktu dapat digunakan untuk memberikan gambaran status kesehatan penduduk secara umum. Angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Buru tahun 2015 mencapai 65,60 persen. Ini mengindikasikan tingkat kesehatan di Kabupaten Buru sudah cukup baik.

Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan, status kesehatan memberikan pengaruh terhadap tingkat produktivitas. Penduduk yang sehat cenderung memiliki kualitas fisik yang baik sehingga memiliki kemungkinan lebih besar untuk dapat beraktivitas dengan baik. Untuk mengukur status kesehatan maka digunakanlah indikator angka kesakitan (*morbidity rate*).

Gambar 4.1
Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di
Kabupaten Buru Tahun 2013-2015

Jenis Kelamin	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]
Laki-laki	18,61	18,35	14,41
Perempuan	18,31	17,82	11,65
Jumlah	15,38	18,09	13,07

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Angka kesakitan merupakan keluhan atas suatu penyakit yang dirasakan oleh penderita dan bukan atas suatu hasil pemeriksaan dokter atau petugas medis lainnya. Angka ini dapat menggambarkan berapa besar persentase penduduk yang mengalami gangguan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah, maupun mengurus rumah tangga.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, persentase penduduk yang merasa mengalami gangguan kesehatan menurut persepsinya sendiri terus menurun. Sedangkan apabila dilihat dari segi jenis kelamin, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, angka kesakitan penduduk perempuan lebih tinggi daripada angka kesakitan penduduk laki-laki. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kondisi fisik laki-laki di Kabupaten Buru lebih kuat dan tidak mudah terserang penyakit dibandingkan perempuan.

4.2 Cara Pengobatan

Tidak semua penduduk yang mengalami keluhan kesehatan akan melakukan pengobatan. Untuk yang melakukan pengobatan, ada dua alternatif pengobatan yang dapat dilakukan, yaitu mengobati dirinya sendiri baik dengan obat tradisional, obat modern, ataupun lainnya serta melakukan pengobatan ke fasilitas/tenaga kesehatan atau yang biasa dikenal dengan istilah berobat jalan.

Tabel 4.2
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan
Menurut Cara Pengobatan yang Dilakukan
Kabupaten Buru Tahun 2015

Jenis Kelamin	Berobat Jalan
[1]	[2]
Laki-laki	42,90
Perempuan	40,16
Jumlah	83,06

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Keadaan ini dapat memberikan gambaran bahwa disatu sisi masyarakat sudah mengerti cara pengobatan sendiri sesuai penyakit yang dideritanya atau malah sebaliknya masyarakat malas atau tidak dapat pergi ke fasilitas kesehatan karena letaknya yang jauh sehingga mereka mengobati dirinya sendiri sebatas pengetahuan dan pengalamannya. Penggunaan obat modern untuk mengobati sendiri pada tahun 2015 telah mencapai 83,06 persen.

Persentase penduduk laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan sebesar 42,90 persen dan penduduk perempuan yang berobat jalan sebesar 40,16 persen. Adapun

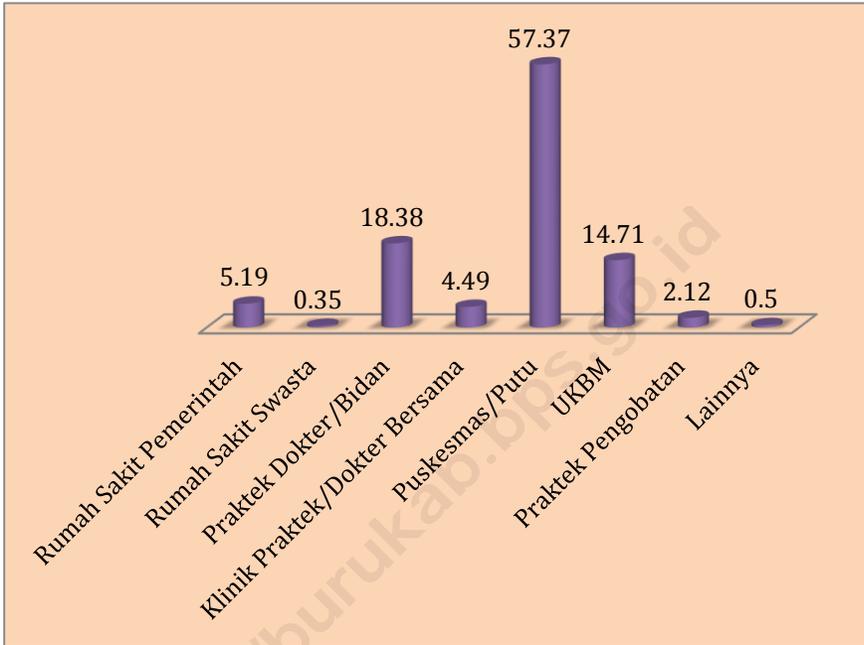
fasilitas kesehatan yang dikunjungi penduduk untuk berobat jalan adalah yaitu : Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Praktek Dokter/Bidan, Klinik Dokter, Puskesmas, UKBM, Praktek pengobatan. Tempat berobat yang paling banyak diminati untuk melakukan pengobatan dan pastinya harga berobatnya pun mudah dijangkau oleh ekonomi masyarakat adalah Puskesmas.

Tabel 4.3
Persentase Penduduk yang Melakukan Berobat Jalan Menurut
Tempat Berobat di Kabupaten Buru Tahun 2015

Tempat Berobat	Jumlah
[1]	[2]
Rumah Sakit Pemerintah	5,19
Rumah Sakit Swasta	0,35
Praktek Dokter/Bidan	18,38
Klinik Praktek/Dokter Bersama	4,49
Puskesmas/Putu	57,37
UKBM	14,71
Praktek Pengobatan	2,12
Lainnya	0,5

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Gambar 4.1
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat
di Kabupaten Buru Tahun 2015



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

4.3 Kesehatan Ibu dan Anak

Salah satu indikator kesehatan yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum adalah mengenai penolong persalinan pada saat proses kelahiran bayi. Jenis penolong persalinan turut menentukan

keberhasilan persalinan dan akan berpengaruh pada kesehatan ibu dan bayi yang ditolong.

Tabel 4.4
Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang
Pernah Kawin dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir di
Kabupaten Buru Tahun 2015

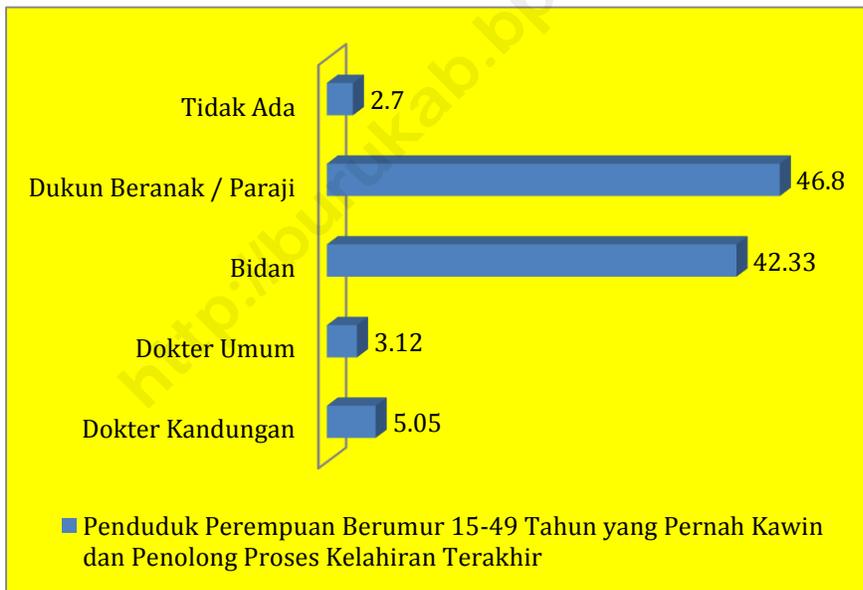
Penolong Proses Kelahiran yang Terakhir	Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir
Dokter Kandungan	5,05
Dokter Umum	3,12
Bidan	42,33
Dukun Beranak / Paraji	46,8
Tidak Ada	2,7

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Semakin dini usia perkawinan pertama seorang perempuan, semakin lama usia subur perempuan tersebut, dan semakin besar pula kemungkinan tingginya angka kelahiran. Namun yang perlu diingat adalah semakin muda usia perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak. Hal ini disebabkan belum matangnya rahim perempuan usia muda untuk memproduksi anak ataupun belum siapnya mental perempuan tersebut untuk berumah tangga.

Perempuan berumur 15-49 tahun di Kabupaten Buru yang pernah kawin penolong proses persalinan terakhir lebih banyak dibantu oleh Bidan sebesar 42,33 persen, akan tetapi ada juga proses persalinan dilakukan tanpa didampingi oleh ahlinya sebesar 2,70 persen dan tentunya hal tersebut beresiko fatal bagi keselamatan bayi dan si ibu.

Gambar 4.2
Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Kabupaten Buru Tahun 2015



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Berdasarkan gambar di atas, sampai dengan tahun 2015 terlihat bahwa persentase ibu yang melahirkan ditolong oleh tenaga non medis baik untuk penolong saat kelahiran pertama maupun penolong saat kelahiran terakhir lebih besar daripada ditolong oleh tenaga medis. Gambaran ini dapat memberikan informasi kemungkinan kurangnya jumlah tenaga medis penolong persalinan ataupun keberadaannya yang tidak merata di wilayah Kabupaten Buru. Selain itu, gambaran ini juga mengindikasikan masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan dalam membantu proses kelahiran.

Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa tenaga medis yang baru ditempatkan itu belum berpengalaman sehingga mereka lebih percaya kepada keluarga ataupun dukun bersalin. Namun mengenai hal ini masyarakat tidak dapat disalahkan mengingat proses persalinan adalah hal yang pribadi dan sangat mementingkan masalah kenyamanan. Di sinilah dituntut kreativitas tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menyertakan tenaga medis dalam proses persalinan.

Tabel 4.5

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Berat Badan Anak Lahir yang Terakhir Ketika Dilahirkan di Kabupaten Buru Tahun 2015

Berat Badan	Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Berat Badan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Ketika Dilahirkan
[1]	[2]
<2,5 kg	15,3
≥ 2,5 kg	41,37
Tidak Tahu	43,33

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tabel 4.6

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin yang Melakukan Inisiasi Dini Lahir dan Jarak Waktu Menyusui Pertama Kali dengan Kelahiran di Kabupaten Buru Tahun 2015

Uraian	Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin yang Melakukan Inisiasi Menyusui Dini Lahir dan Jarak Waktu Menyusui Pertama Kali dengan Kelahiran
[1]	[2]
< 1 Jam	7,52
1-23 Jam	23,24
≥ 1 Hari	21,85
Tidak Tahu	47,39

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

4.4 Pemberian ASI dan Gizi Balita

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang paling penting bagi pertumbuhan dan gizi bayi karena selain mengandung nilai gizi yang cukup tinggi, juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit, oleh karena itu semakin lama anak disusui akan semakin baik tingkat pertumbuhan dan kesehatannya.

Peranan gizi dalam kehidupan manusia dipandang sangat penting karena keadaan gizi yang buruk mencerminkan pula kehidupan masyarakat yang belum baik. Gizi mempunyai hubungan langsung dengan tingkat kesehatan masyarakat, namun tidak secara langsung mencerminkan kemiskinan masyarakat. Kenyataan membuktikan bahwa semakin miskin masyarakat, secara relatif semakin besar pula pengeluaran untuk makanan.

Gizi memegang peranan yang sangat penting terutama pada anak-anak yang berumur dibawah lima tahun karena pada usia ini mereka sangat memerlukan tingkat gizi yang baik guna pembentukan dan pertumbuhan tubuhnya yang sekaligus juga mempengaruhi tingkat kesehatan, intelektualitas, prestasi, dan produktivitasnya dikemudian hari. Oleh karena itu, peningkatan kualitas fisik penduduk seyogyanya dilakukan sedini mungkin yaitu dengan memberikan perhatian pada status kesehatan balita.

Tabel 4.7
Persentase Balita Usia 2-4 Tahun Menurut Lamanya Disusui di
Kabupaten Buru Tahun 2015

Lama Menyusui	Jumlah
[1]	[2]
< 12	61,17
12-15	26,18
16-19	7,69
20-23	4,97

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Gambar 4.3

Persentase Balita Berumur 2-4 Tahun Menurut Lamanya Disusui di Kabupaten Buru Tahun 2015



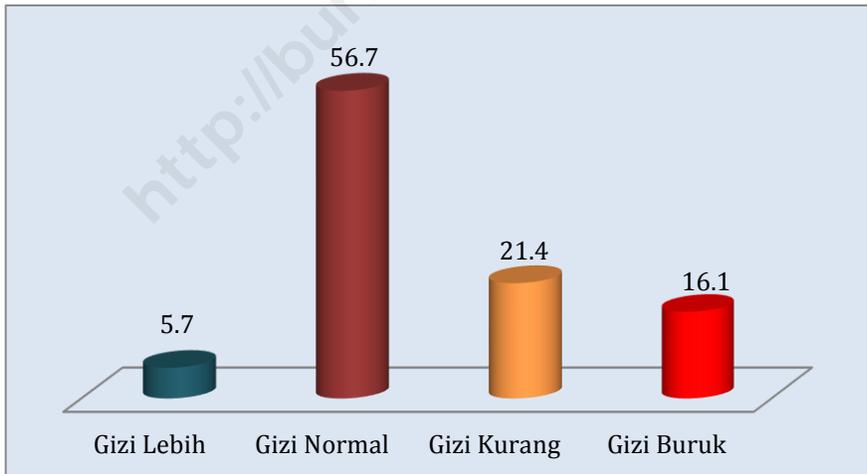
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tabel 4.8
Persentase Balita Menurut Status Gizi di
Kabupaten Buru Tahun 2015

Status Gizi	Jumlah
[1]	[2]
Gizi Lebih	5,7
Gizi Normal	56,7
Gizi Kurang	21,4
Gizi Buruk	16,1

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Gambar 4.4
Persentase Balita Berumur 2-4 Tahun Menurut Status Gizi di
Kabupaten Buru Tahun 2015



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

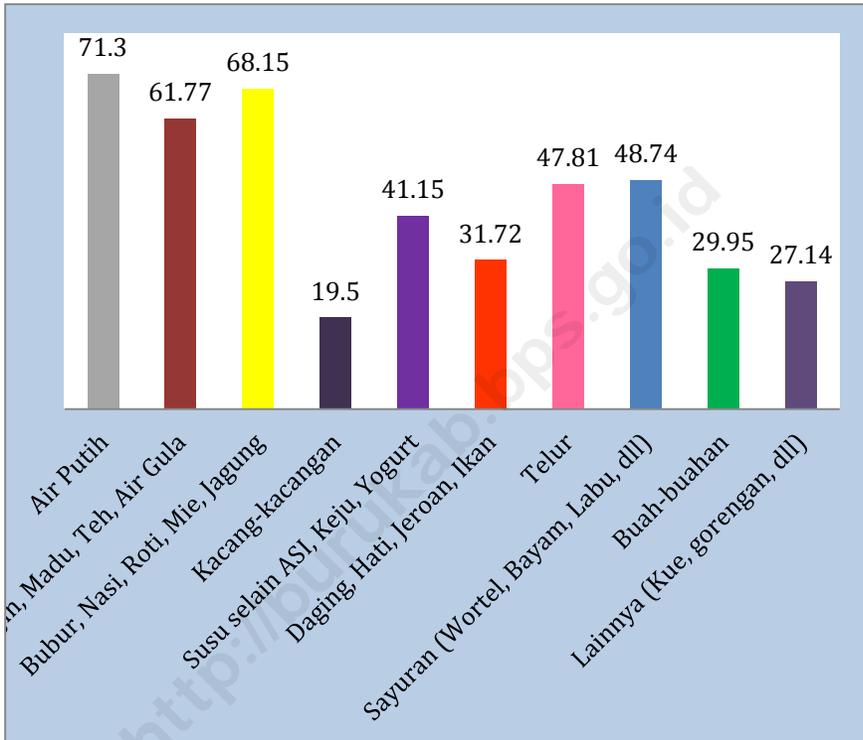
Menurut data yang diuraikan diatas, maka dapat dilihat bahwa di Kabupaten Buru pada tahun 2015, gizi lebih balita sebesar 5,7 persen, gizi normal sebesar 56,7 persen, gizi kurang sebesar 21,4 persen dan gizi buruk sebesar 16,1 persen.

Tabel 4.9
Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Mendapat
Makanan atau Cairan yang Dimakan Dalam 24 Jam di
Kabupaten Buru Tahun 2015

Makanan atau Cairan yang Dimakan Dalam 24 Jam	Jumlah
[1]	[2]
Air Putih	71,3
Air Tajin, Madu, Teh, Air Gula	61,77
Bubur, Nasi, Roti, Mie, Jagung	68,15
Kacang-kacangan	19,5
Susu selain ASI, Keju, Yogurt	41,15
Daging, Hati, Jeroan, Ikan	31,72
Telur	47,81
Sayuran (Wortel, Bayam, Labu, dll)	48,74
Buah-buahan	29,95
Lainnya (Kue, gorengan, dll)	27,14

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Gambar 4.5
Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Mendapat
Makanan atau Cairan yang Dimakan Dalam 24 Jam di
Kabupaten Buru Tahun 2015



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

4.5 Pemanfaatan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, dari tahun ke tahun pemerintah membangun sarana kesehatan yang dilengkapi dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang diperlukan.

Tabel memperlihatkan penyebaran fasilitas kesehatan di Kabupaten Buru. Terlihat bahwa rumah sakit yang ada di Kabupaten Buru hanya satu buah dan terletak di ibu kota kabupaten, yaitu di Kecamatan Namlea. Oleh karena itu, Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu sangat berperan dalam melayani penduduk yang berada di kecamatan-kecamatan lain.

Selama tiga tahun terakhir, tidak banyak perubahan dalam jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Buru kecuali untuk jumlah bidan dan perawat umum. Hal ini tentunya sangat baik mengingat dengan bertambahnya jumlah tersebut maka diharapkan masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk dibantu dalam menangani berbagai masalah kesehatan yang diderita dan dapat meningkatkan derajat kesehatannya.

Tabel 4.10
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di
Kabupaten Buru Tahun 2015

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Posyandu	Polindes
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Namlea	1	1	16	6
Waeapo	0	2	15	4
Waplau	0	1	10	4
Bata Bual	0	1	9	1
Teluk Kaiely	0	1	7	0
Waelata	0	1	17	2
Lolong Guba	0	1	9	2
Lilialy	0	1	9	2
Airbuaya	0	1	17	4
Fena Leisela	0	1	16	4
Buru	1	11	125	29

Sumber : Kabupaten Buru Dalam Angka 2016

Tabel 4.11
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di
Kabupaten Buru Tahun 2015

Kecamatan	Tenaga Medis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Lainnya
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Namlea	1	43	18	3	52
Waeapo	0	28	12	0	8
Waplau	0	9	3	0	5
Bata Bual	0	6	3	0	2
Teluk Kaiely	0	2	3	0	2
Waelata	0	15	5	0	3
Lolong Guba	0	8	2	0	1
Lilialy	0	5	5	0	5
Airbuaya	0	12	3	0	4
Fena Leisela	0	12	6	0	2
Buru	1	140	42	3	84

Sumber : Kabupaten Buru Dalam Angka 2016

v

PENDIDIKAN

<http://burukab.go.id>



V

PENDIDIKAN

Salah satu tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, tugas pembangunan yang semakin berat juga menuntut peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan tidak hanya mengandalkan modal Sumber Daya Alam (SDA). Pendidikan SDM sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan untuk mengelola SDA. Oleh karena itu komitmen untuk memanfaatkan hasil SDA itu harus didukung dengan perangkat pendidikan yang kuat dan berpotensi untuk mengakomodasi tujuan dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah sekaligus memberikan kontribusi aktif terhadap pembangunan daerah.

Investasi terhadap proses pendidikan SDM merupakan salah satu jembatan emas untuk memacu tingkat kemampuan berpikir seseorang kearah yang lebih rasional, produksi, dan manusiawi dalam berbagai aspek kehidupan guna membentuk pola hidup yang searah dan selaras sesuai dengan kebijakan dan perkembangan pembangunan yang ada.

Upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan oleh pemerintah mulai dari pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengecap pendidikan terutama pada tingkat dasar hingga peningkatan kualitas dan kuantitas sarana maupun prasaran pendidikan serta peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN.

Program pemerintah yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi guna melihat ketimpangan-ketimpangan yang masih terjadi, kendala, dan juga kemajuan-kemajuan yang berhasil dicapai. Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut dibutuhkan data yang akurat dan terpercaya agar kebijakan yang diambil sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

5.1 Tingkat Pendidikan

Salah satu indikator mendasar dari bidang pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis. Seseorang yang dapat membaca sekaligus menulis dikatakan melek huruf atau tidak buta huruf. Dengan demikian angka yang ditampilkan dari indikator ini dapat digunakan sebagai tolak ukur sejauh mana upaya pihak-pihak terkait dalam memberantas buta huruf di Kabupaten Buru.

Seperti yang diketahui, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka buta huruf antara lain melalui pendidikan luar sekolah, pembebasan pembayaran uang sekolah, pemberian beasiswa, dan sebagainya. Bahkan pemerintah meluncurkan program besar yang dikenal dengan nama program BOS (Biaya Operasional Sekolah) sebagai upaya untuk menyalurkan dana secara langsung ke sekolah-sekolah agar murid dapat bersekolah dan sekaligus memberikan kebebasan bagi sekolah untuk mengelola dana mereka sendiri.

Persentase penduduk Kabupaten Buru berumur 15 tahun ke atas yang dapat baca tulis bahasa latin totalnya sebesar 186,01

persen, dapat baca dan tulis bahasa arab totalnya sebesar 108,46 persen, dapat baca dan tulis bahasa lainnya totalnya sebesar 9,35 persen. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kemampuan baca tulis penduduk laki-laki lebih besar daripada perempuan. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Buru hendaknya dapat lebih memfokuskan program pemberantasan buta huruf bagi perempuan sehingga secara tidak langsung turut memberdayakan penduduk perempuan agar memiliki kesempatan yang lebih baik dalam meraih peluang ekonomi maupun sosial.

Tabel 5.1
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan
Kemampuan Membaca dan Menulis Menurut Jenis Kelamin di
Kabupaten Buru Tahun 2015

Kemampuan Baca Tulis	Laki-laki	Perempuan	Total
[1]	[2]	[3]	[4]
Huruf Latin	94,96	91,05	186,01
Huruf Arab	56,21	52,25	108,46
Huruf Lainnya	4,16	5,19	9,35
Buta Huruf	3,57	4,48	8,05

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

5.2 Angka Partisipasi Sekolah

Salah satu indikator yang dihasilkan dari keikutsertaan penduduk dalam pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Selain itu, APS juga dapat memperlihatkan upaya dalam memperluas jangkauan pelayanan pendidikan atau akses ke pendidikan formal dan pemerataan pendidikan.

Dalam indikator ini, usia sekolah dikelompokkan sesuai jenjangnya, yaitu usia 7-12 tahun (SD/MI), 13-15 tahun (SMP/MTS), 16-18 tahun (SMA/SMK/MA) dan 19-24 tahun (Perguruan Tinggi/Universitas).

Tabel 5.2

Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Kelompok Umur 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buru Tahun 2015

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
[1]	[2]	[3]	[4]
7-12	96,74	100	98,33
13-15	98,12	96,44	97,28
16-18	86,39	79,41	83,43
19-24	16,14	12,15	13,99
Total	76,99	72,96	75,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Dari tabel tersebut terlihat bahwa secara umur APS berbanding terbalik dengan kelompok umur penduduk atau dengan kata lain semakin tinggi umur penduduk, semakin menurun tingkat partisipasi sekolahnya.

Angka partisipasi sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun di Kabupaten Buru pada tahun 2015 berada di atas 90 persen. Sedangkan untuk kelompok umur 13-15 tahun berada pada angka 97,28 persen dan pada kelompok umur 16-18 tahun, angka partisipasi sekolahnya hanya sebesar 83,43 persen dan kelompok umur 19-24 tahun angka partisipasi sekolahnya hanya sebesar 13,99 persen. Hal ini patut mendapat perhatian oleh pemerintah, apakah hal tersebut disebabkan biaya pendidikan atau karena tidak tersedianya fasilitas sekolah untuk jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 5.3

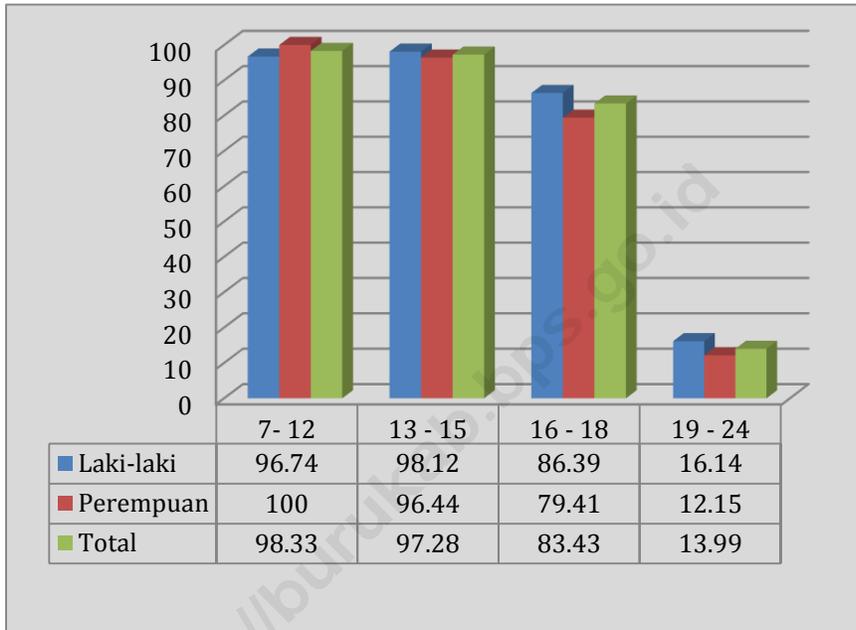
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 7-24 Tahun
Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di
Kabupaten Buru Tahun 2015**

Jenis Kelamin dan Kelompok	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
[1]	[2]	[3]	[4]
Laki-laki			
7-12	321	8.959	7.212
13-15	409	4.508	5.031
16-18	425	4.946	5.368
19-24	378	5.204	6.006
Perempuan			
7-12	587	9.075	5.891
13-15	534	3.402	4.995
16-18	495	4.900	4.763
19-24	450	4.501	4.209
Laki-laki dan Perempuan			
7-12	908	18.034	13.103
13-15	943	7.910	10.026
16-18	920	9.846	10.131
19-24	828	9.705	10.215

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Gambar 5.1

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 7-24 Tahun
Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di
Kabupaten Buru Tahun 2015**



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tabel 5.4**Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buru Tahun 2015**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
[1]	[2]	[3]	[4]
7-12	107,32	116,26	111,69
13-15	97,18	70,07	83,66
16-18	115,86	119,98	117,61
19-24	7,86	9,50	8,75

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Buru pada tahun 2016 berdasarkan kelompok umur mulai dari 7 sampai 24 tahun yakni untuk laki-laki yang tertinggi di kelompok umur 16-18 tahun sebesar 115,86 persen, sedangkan terendah adalah di kelompok umur 19-24 tahun sebesar 7,86 persen. Untuk perempuan APK tertinggi adalah di kelompok umur 7-12 tahun sebesar 119,98 persen dan terendah kelompok umur 19-24 tahun sebesar 9,50 persen.

Tabel 5.5
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan
dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buru Tahun 2015

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
[1]	[2]	[3]	[4]
Sekolah Dasar	87,50	98,43	92,85
Sekolah Menengah Pertama	71,42	66,12	68,78
Sekolah Menengah Umum	78,13	77,23	77,75
Perguruan Tinggi	4,78	9,15	7,14

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Angka Partisipasi Murni (APM) berdasarkan jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. APM laki-laki tertinggi adalah jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebesar 87,50 persen dan terendah adalah Perguruan Tinggi sebesar 4,78 persen. Sedangkan APM perempuan tertinggi yakni Sekolah Dasar sebesar 98,43 persen dan terendah Perguruan Tinggi sebesar 9,15 persen.

5.3 Fasilitas Pendidikan

Kemiskinan dan keterisolasian masih merupakan kendala utama dalam dunia pendidikan. Masyarakat masih lebih mementingkan kebutuhan untuk konsumsi makanan dibandingkan pendidikan apalagi jika untuk memperoleh fasilitas pendidikan dibutuhkan biaya yang tinggi dan akses transportasi yang sulit dijangkau. Tak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan fasilitas pendidikan yang mudah dijangkau baik dari segi jarak maupun biaya sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan penduduk suatu daerah.

Apabila diperhatikan lebih lanjut, biasanya jumlah sekolah berbanding terbalik dengan tingkat pendidikannya, begitu pula yang terjadi di Kabupaten Buru. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin berkurang sarana sekolah yang tersedia di Kabupaten Buru, padahal dari segi kuantitas, semakin banyak sekolah maka semakin terbuka peluang untuk menjangkau masyarakat, tergantung penyebaran atau lokasi sekolah tersebut.

Tabel 5.6
Jumlah Fasilitas Pendidikan Berdasarkan
Jenjang Pendidikan Menurut Kecamatan di
Kabupaten Buru Tahun 2015

Kecamatan	SD	MI	SMP	MTs	SMU	MA	SMK
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Namlea	16	1	6	2	3	2	3
Waeapo	10	2	4	2	1	1	1
Waplau	17	0	5	1	2	0	0
Bata Bual	9	0	4	2	2	1	0
Teluk Kaiely	9	0	2	0	0	0	1
Waelata	13	3	4	2	1	0	0
Lolong Guba	20	3	4	1	1	0	0
Lilialy	8	1	3	1	1	0	1
Airbuaya	14	0	8	0	2	0	1
Fena Leisela	21	0	8	1	0	0	1
Buru	137	10	48	12	13	4	8

Sumber: Kabupaten Buru Dalam Angka 2016

Dari segi jumlah dan penyebaran menurut kecamatan, jumlah sekolah untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar sudah cukup banyak dan dirasakan sudah mencukupi kebutuhan. Namun yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah apakah lokasi sekolah-sekolah tersebut sudah cukup mudah dijangkau oleh masyarakat. Karena seperti yang diketahui, Kabupaten Buru memiliki wilayah yang sulit dijangkau, misalnya saja desa-desa maupun dusun-dusun yang letaknya menyebar di sekitar pegunungan dan Danau Rana.

Sedangkan untuk jenjang pendidikan MI, SMP, MTs, SMU, MA dan SMK baik dari segi jumlah maupun penyebarannya dirasakan masih kurang, dikarenakan sangat pentingnya pendidikan bagi masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik, maka sangat diharapkan adanya penambahan gedung sekolah dengan berbagai penunjang fasilitas yang memadai serta didukung pula dengan tenaga pengajar yang memiliki kualitas pendidikan yang bagus, sehingga proses belajar mengajarpun dapat terlaksana secara maksimal agar kelak dapat menghasilkan tunas bangsa yang mampu membangun daerah khususnya kearah yang lebih baik.

VI
TARAF DAN POLA
KONSUMSI



VI TARAF DAN POLA KONSUMSI

Masalah kemiskinan di Indonesia bukan hanya menyangkut jumlahnya yang besar, namun juga terjadinya disparitas yang lebar antar wilayah. Pola yang selama ini terjadi di Indonesia adalah sejumlah besar penduduk akan tergolong miskin apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah. Misalnya saja biasanya penduduk miskin akan bertambah apabila terjadi penyesuaian harga kebutuhan pokok, harga minyak dan bahan bakar, kenaikan harga bahan makanan, kenaikan tarif dasar listrik, dan lain sebagainya.

Adapun suatu rumah tangga atau penduduk dapat dikategorikan sebagai rumah tangga atau penduduk miskin apabila pendapatan mereka kurang dari yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum untuk hidup layak. Pendapatan rumah tangga itu sendiri dapat dideteksi dari proksi pengeluaran rumah tangga. Hal ini dikarenakan selama survei yang dilakukan, informasi pendapatan dari rumah tangga selalu *under estimate*. Rumah tangga lebih mudah memberikan informasi tentang pengeluaran dari pada pendapatannya.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah pun tidak tinggal diam. Di bawah koordinasi Wakil Presiden, Pemerintah telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Selain itu, menurut UU No. 23/2000, penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui tiga program. Pertama, penyediaan

kebutuhan pokok berupa bahan pokok pangan, pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin secara merata. Kedua, pengembangan budaya usaha masyarakat miskin hingga dapat melakukan usaha ekonomi rakyat yang produktif atas dasar sikap demokrasi dan mandiri. Ketiga, pengembangan sistem dana jaminan sosial yang dapat melindungi kelompok masyarakat dari situasi yang mengurangi pendapatan atau konsumsinya.

6.1 Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang pendapatannya lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2100 kalori sehari, perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain. Jumlah rupiah tersebut kemudian disebut sebagai garis kemiskinan.

Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting yang dapat dipergunakan untuk mengukur angka kemiskinan. Indikator yang paling sering dipergunakan adalah *Head-Count Index* (Po). Ukuran ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun demikian, indikator ini tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam tingkat

kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tidak berubah jika seseorang yang miskin bertambah miskin.

Tabel 6.1
Persentase Penduduk Miskin (P0), Kedalaman Kemiskinan (P1),
Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Buru Tahun 2013-2015

Tahun	Po	P1	P2
	%	%	%
[1]	[2]	[3]	[4]
2013	18,51	2,72	0,58
2014	17,55	2,66	0,61
2015	18,47	2,92	0,67

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Selain *Head Count Index* atau persentase penduduk miskin, dikenal beberapa indikator kemiskinan lainnya, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Hal ini disebabkan karena *Head Count Index* tidak dapat mengindikasikan seberapa dalam/parah tingkat kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap tidak berubah jika seseorang yang miskin menjadi bertambah miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P1) adalah rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk

miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin dalam tingkat kemiskinan karena semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Buru pada tahun 2015 sebesar 2,92 persen.

Indeks Keparahan Kemiskinan atau *Poverty Severity Index* (P2) adalah sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks ini, semakin parah tingkat kemiskinan karena semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Buru pada tahun 2015 sebesar 0,67 persen.

6.2 Pengeluaran Rumah Tangga

Untuk mengatasi sulitnya memperoleh informasi pendapatan penduduk, digunakan pendekatan pengeluaran. Dengan pendekatan ini, biasanya responden akan memberikan informasi sedetil mungkin menyangkut pengeluaran/belanja selama periode tertentu. Dengan demikian pendekatan pengeluaran dapat digunakan sebagai perkiraan pendapatan.

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas

permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.

Tabel 6.2
Persentase Konsumsi Protein dan Konsumsi Kalori per Kapita per Hari di Kabupaten Buru Tahun 2015

Uraian	Konsumsi Protein per Kapita per Hari	Konsumsi Kalori per Kapita per Hari
[1]	[2]	[3]
Padi-padian	21,03	896,05
Umbi-umbian	0,46	91,40
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	13,95	85,54
Daging	1,07	18,85
Telur dan Susu	1,61	34,46
Sayur-sayuran	2,10	28,75
Kacang-kacangan	1,87	19,16
Buah-buahan	0,43	35,09
Minyak dan Kelapa	0,64	265,60
Bahan Minuman	0,89	100,36
Bumbu-bumbuan	0,40	10,17
Konsumsi Lainnya	0,87	38,96
Makanan dan Minuman Lainnya	5,75	243,63
Rokok	-	-
Total	51,07	1.868,05

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang disajikan dalam

unitkalori dan protein. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut

Tabel 6.3
Rata-rata Pengeluaran Sebulan per Kapita Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Buru Tahun 2015

Uraian	Rata-rata Pengeluaran Sebulan per Kapita
[1]	[2]
Makanan	
Padi-padian	94.498
Umbi-umbian	12.851
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	65.647
Daging	8.481
Telur dan Susu	20.063
Sayu-sayuran	45.955
Kacang-kacangan	6.343
Buah-buahan	31.529
Minyak dan Kelapa	16.509
Bahan Minuman	23.099
Bumbu-bumbuan	15.801
Konsumsi Lainnya	8.280
Makanan dan Minuman Jadi	75.773
Rokok	75.313
Total	500.142
Non Makanan	
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	257.512

Aneka Barang dan Jasa	79.126
Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	24.933
Barang yang Tahan Lama	47.665
Pajak, Pungutan dan Asuransi	8.789
Keperluan Pesta dan Upacara	7.304
Total	425.329

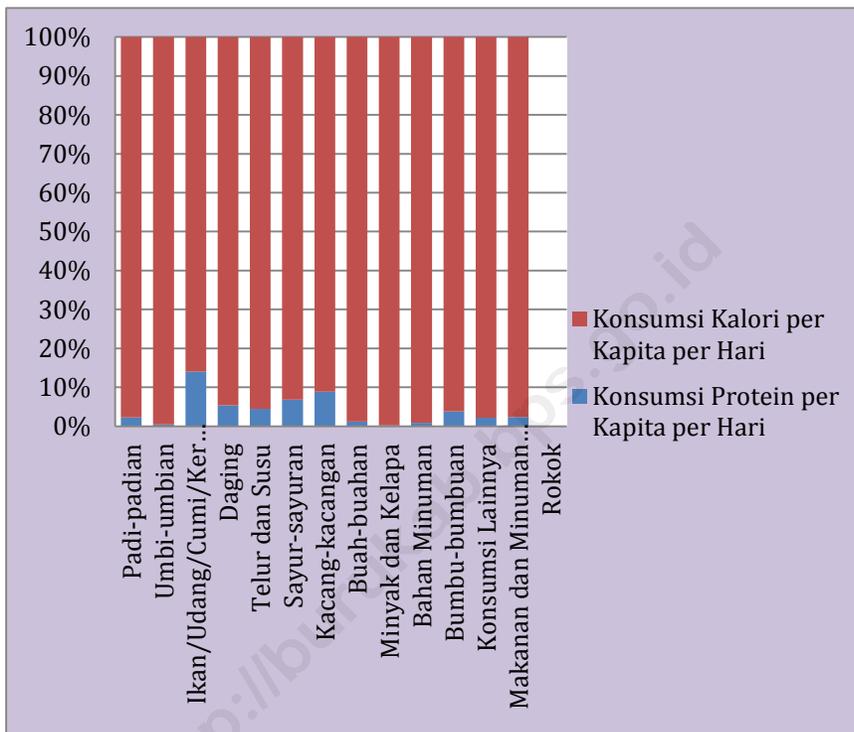
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Seperti yang telah diketahui, pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan umumnya tinggi. Hal tersebut dapat terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi barang bukan makanan atau ditabung.

Penduduk Kabupaten Buru masih memiliki pola pengeluaran dimana pengeluaran untuk makanan lebih besar daripada bukan makanan. Dari jumlah total pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Buru pada tahun 2015, yaitu sebesar 500.142, sedangkan pengeluaran non makanan sebesar 425.329.

Gambar 6.1

Rata-rata Pengeluaran Sebulan per Kapita Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Buru Tahun 2015



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

VII
PERUMAHAN DAN
LINGKUNGAN



VII

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Manusia dan alam lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik dapat berupa alam sekitar yang alamiah maupun buatan manusia. Untuk mempertahankan diri dari keganasan alam, manusia berusaha membuat tempat perlindungan yang pada akhirnya disebut rumah atau tempat tinggal.

Pada saat ini rumah sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan status simbol dan juga menunjukkan identitas pemiliknya. Kondisi dan kualitas rumah yang ditempati dapat menunjukkan keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Semakin baik kondisi dan kualitas rumah yang ditempati menunjukkan semakin baik keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Selain kualitas rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Untuk memenuhi kodratnya sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Untuk itu, seiring berjalannya waktu timbul kelompok-kelompok rumah yang disebut dengan permukiman. Penggunaan lahan untuk permukiman ini perlu ditata dengan baik agar tercipta permukiman yang sehat dan nyaman. Karena seperti yang

diketahui, permintaan terhadap rumah akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk mengingat rumah merupakan satu dari tiga kebutuhan dasar manusia selain makanan dan pakaian.

7.1 Kualitas Rumah Tinggal

Aspek kesehatan dan kenyamanan dan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas bangunan adalah luas lantai karena semakin kecil luas lantai maka kenyamanan rumah tersebut akan terganggu.

Kualitas rumah tinggal juga sangat ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Kualitas bahan bangunan yang digunakan dapat dilihat dari jenis atap, dinding, dan lantai yang digunakan.

Jenis lantai yang dilihat adalah apakah lantai yang digunakan oleh rumah tangga masih berupa tanah atau tidak. Karena lantai yang masih berupa tanah akan menimbulkan tingginya kelembapan udara dalam rumah sehingga penghuninya mudah terserang penyakit. Persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan lantai semen memiliki persentase yang tinggi sebesar 52,69 persen.

Tabel 7.1
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jenis Atap Terluas
di Kabupaten Buru Tahun 2015

Jenis Atap Terluas	Persentase
[1]	[2]
Beton	1,02
Genteng	3,61
Asbes	5,64
Seng	86,33
Bambu/Kayu/Sirap	0,95
Jerami/Ijuk/Daun/Rumbia	2,45
Lainnya	0,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tabel 7.2
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jenis Dinding
Terluas di Kabupaten Buru Tahun 2015

Jenis Dinding Terluas	Persentase
[1]	[2]
Tembok	65,48
Plesteran Anyaman	0,00
Kayu/Batang Kayu	34,18
Bambu/Anyaman	0,34
Lainnya	0,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tabel 7.3**Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jenis Lantai Terluas
di Kabupaten Buru Tahun 2015**

Kriteria	Persentase
[1]	[2]
Marmer/Granit	3,41
Keramik	15,96
Parket/Vinil/Permadani/Ubin/Tegel/Teraso	13,2
Kayu/Papan Kualitas Tinggi	0,29
Semen/Bata Merah	52,69
Bambu/Kayu/Papan Kualitas Rendah	1,00
Tanah	13,46
Lainnya	0,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tidak berbeda dengan sebagian besar rumah tangga di Provinsi Maluku, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Buru menggunakan atap terluas berupa seng, bahkan persentasenya mencapai 86,33 persen. Seng dipilih karena selain mudah diperoleh, harganya pun masih terjangkau dan memiliki masa pakai cukup lama. Penggunaan dinding permanen di Kabupaten Buru pada tahun 2015 mencapai 65,48 persen.

Dari paparan di atas, perlu diperhatikan bahwa penentuan atap dan dinding rumah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja, namun juga faktor budaya dan ketersediaan bahan baku. Oleh karena itu pemerintah hendaknya membantu dalam hal penyediaan bahan baku dalam upaya pembuatan rumah tinggal yang sehat bagi masyarakat.

7.2 Fasilitas Rumah Tinggal

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan kualitas dan tingkat kenyamanan rumah tinggal tersebut. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah akses terhadap air bersih, tersedianya jamban dengan tangki septik, serta tak kalah pentingnya adalah ketersediaan listrik di rumah tinggal tersebut.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan pemerintah.

Salah satu sumber air minum yang persentasenya terbesar adalah air kemasan bermerk/isi ulang sebesar 31,51 persen, akan tetapi ada pula penduduk yang sampai saat ini masih menggunakan air hujan untuk sebagai sumber air minum dan kebutuhan sehari-hari.

Tabel 7.4
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum
Utama di Kabupaten Buru Tahun 2015

Kriteria	Persentase
[1]	[2]
Air Kemasan Bermerk/Isi Ulang	31,51
Ledeng Meteran/Eceran	1,09
Sumur Bor/Pompa	8,21
Sumur Terlindung	27,84
Sumur Tak Terlindung	8,85
Mata Air Terlindung/Tak Terlindung	20,49
Air Permukaan	0,00
Air Hujan	2,01
Lainnya	0,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tabel 7.5
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Tempat
Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Buru Tahun 2015

Kriteria	Persentase
[1]	[2]
Tangki Septik	38,96
SPAL	27,74
Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut	9,43
Lubang Tanah	9,55
Pantai/Tanah Lapang/Kebun/Lainnya	14,31

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Sistem pembuangan kotoran manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi berdasarkan sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak lepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana.

Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut di atas adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada

tahun 2015, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap jamban dengan tangki septik sebesar 38,96 persen.

Salah satu fasilitas perumahan yang penting untuk dimiliki adalah listrik. Fungsi utama dari listrik itu sendiri adalah sebagai sumber penerangan walaupun tidak dipungkiri bahwa sekarang ini hampir seluruh kegiatan rumah tangga memerlukan listrik sehingga tanpa adanya listrik, tentu kegiatan rumah tangga akan terganggu. Persentase rumah tangga yang memiliki listrik PLN sebesar 79,57 persen, listrik non PLN sebesar 6,91 persen dan masyarakat Kabupaten Buru sampai saat ini masih ada yang menggunakan alat penerangan berupa pelita/obor/lampu pertamax yakni sebesar 13,52 persen.

Tabel 7.6

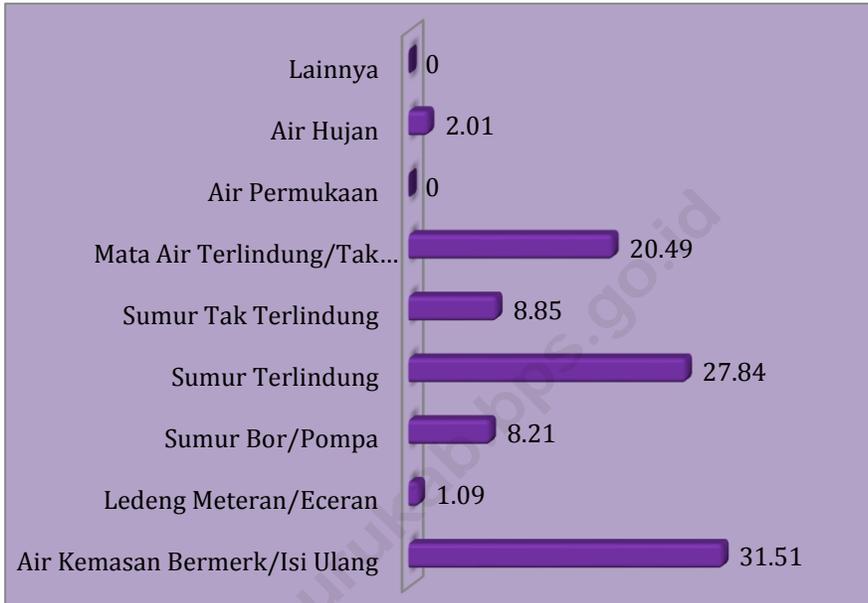
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Penerangan di Kabupaten Buru Tahun 2015

Kriteria	Persentase
[1]	[2]
Listrik PLN	79,57
Listrik Non PLN	6,91
Bukan Listrik	13,52

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Gambar 7.1

**Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum
Utama di Kabupaten Buru Tahun 2015**



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional



D A T A
MENCERDASKAN BANGSA

<http://burukab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru

Jln. Sultan Babullah, Namlea 97571

Telp/Fax : (0913) 21778

E-mail : bps8104@mailhost.bps.go.id

Website : burukab.bps.go.id